

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Nasution, S. A. (2022). The Role Grants In Infrastructure Development Efforts. *Jurnal EMBA Review*, 2(1), 171-176. doi:<http://doi.org/10.53697/emba.v2i1>
- Berita Kalteng. (2020). *MELALUI KEGIATAN TMMD JALAN PENGHUBUNG TURAN AMIS MENUJU SIDANG DIBUKA*. Kalimantan Tengah. Dipetik Oktober 13, 2022, dari <https://beritakalteng.com/2020/10/13/melalui-kegiatan-tmmd-jalan-penghubung-turan-amis-menuju-sidang-dibuka/>
- Fatihudin, D. (2020). *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ginanjari, Y., & Harikesa, I. W. (2021). Implementasi Program Sanitasi Australia-Indonesia Infrastructure Grants For Sanitation/SAIIG di Kota Cimahi Jawa Barat Pada Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 4(2), 396-409. doi:<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.465>
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Irfansyah, A. (2021). Analisis Faktor Penyebab SiLPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 57-73.
- Kabupaten Bengkalis. (2022). *Surat Arahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.2/DPMD/Pemdes/2023/871 tentang Arahan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Program Desa BERMASA kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis*.
- Kabupaten Bengkalis. (2023). *Surat Arahan Nomor 412.2/DPMD-Pemdes/108 tentang Rekonsiliasi Sisa Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKK) Program Desa BERMASA TA. 2022*.
- Kusmana, D., & Ismail. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(1), 81-100.
- Lestari, K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2019). Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi Bali Kepada Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 259-264.
- Mardianis, M., & Desmaryani, S. (2021). Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi, Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 18(2), 211-223.

- Prasetyo, M. H., Mustain, M. M., & Supriyanto. (2018). Analisis Bantuan Keuangan Khusus terhadap Peningkatan Infrastruktur Masyarakat Desa Sebagai Indikator Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Jombang. *Journal Of Public Power*, 79-94.
- Prastiyani, A. E., & Solikin, A. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 31-43.
- Pratama, I. A., & Wiratmaja, I. N. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 2556-2568.
- Provinsi Riau. (2019). *Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa*.
- Provinsi Riau. (2021). *Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Nomor 051/KPTS/X/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa*.
- Provinsi Riau. (2021). *Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus atau Hibah BERMASA*.
- Ramli, S., & Fahrurrazi. (2014). *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis 2021-2026*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa*.

- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.*
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.*
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.*
- Satriajaya, J., & dkk. (2018). Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 1-21.
- Satuju. (2022). Dipetik September 14, 2022, dari Pemkab Bengkalis Melalui Dinas PMD Terus Upayakan Seluruh desa Lakukan Program Melalui dana BKK: <https://www.satuju.com/berita/2061/pemkab-bengkalis-melalui-dinas-pmd-terus-upayakan-seluruh-desa-lakukan-program-melalui-dana-bkk.html>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulkarnain. (2022). Pelaksanaan Swakelola di Desa Wonosari. Bengkalis, Riau.